

Indonesia dan Tantangan DK PBB

Penulis: [Angel Damayanti](#) [Dekan Fisiopol WKI Jakarta](#)
Pada: Jumat, 03 Mei 2019, 04:10 WIB [OPINI](#)



Ist

Ilustrasi

SEPANJANG Mei 2019-Agustus 2020 Indonesia bertugas sebagai Presiden di Dewan Keamanan (DK) PBB. Komitmen Indonesia dalam memerangi terorisme, keterlibatannya di pasukan perdamaian PBB, serta keberhasilan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, melalui ASEAN, memberikan rasa percaya diri bagi Indonesia untuk mengusung isu-isu tersebut ketika menjadi Presiden di DK PBB, sebagaimana disampaikan Menlu Retno LP Marsudi (Media Indonesia, 6/6/2018).

Menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 2019-2020 dan Presiden DK PBB pada Mei 2019-Agustus 2020, di satu sisi memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjembatani kepentingan nasional, kepentingan negara-negara di Asia yang diwakili Indonesia, sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat internasional dalam upaya pemeliharaan stabilitas dan keamanan internasional.

Tantangan

Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, terutama pasal 25 yang menyebutkan The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter, DK PBB memiliki keistimewaan tersendiri. Berbeda dengan organ lainnya, dalam PBB yang hanya dapat memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota PBB, DK PBB memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang diterima dan dilaksanakan seluruh anggota PBB.

Pentingnya fungsi DK PBB dibarengi juga dengan adanya hak veto yang hanya dimiliki lima negara anggota tetap DK PBB, yang menjadi pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Awalnya, hak veto diberikan sebagai daya tarik agar lima negara tersebut bersedia terlibat dalam PBB. Belajar dari pengalaman Liga Bangsa-bangsa (LBB) yang lebih dulu dibentuk, ketidakhadiran AS di dalamnya membuat LBB tidak bertahan lama.

Hakikatnya, hak veto ini diberikan kepada lima negara pemenang perang tersebut untuk mencegah DK PBB mengambil keputusan yang dianggap mengancam kelima negara besar tersebut dan berujung pada Perang Dunia. Itu berarti, kelima negara pemegang hak veto memiliki kekuatan sekaligus tanggung jawab besar untuk mencegah terjadinya perang dan memastikan PBB dapat menjalankan fungsinya.

Yang terjadi, hak veto justru sering kali digunakan negara-negara tersebut untuk mengamankan kepentingan nasional dan negara-negara sekutunya. Sejak 1946 hingga 2016, AS misalnya, telah mengeluarkan 79 kali veto dan Rusia mengeluarkan 104 kali veto terhadap sejumlah draf resolusi yang dikeluarkan DK PBB karena dianggap mengancam kepentingan mereka.

Dalam 10 tahun terakhir, AS, Rusia, dan Tiongkok menjadi negara yang lebih sering mengeluarkan veto jika dibandingkan dengan Inggris dan Prancis. AS, Tiongkok, dan Rusia misalnya, baru-baru ini saling melakukan veto terkait dengan krisis politik di Suriah dan Venezuela. Sebelumnya, AS juga telah mengeluarkan veto terhadap draf resolusi DK PBB terkait dengan status Jerusalem dan kecaman atas tindakan Israel di jalur Gaza.

Berita Terkini

Siklon Tropis Lili Tumbuh di Laut Timor, Pelayaran Harus Waspada

HUMANIORA

Kecepatan angin maksimum di pusat siklon mencapai 35-40 knot dengan arah gerak ke Selatan-Barat...



Kamis, 09 Mei 2019, 16:05 WIB

Bupati Malang Divonis 6 Tahun Penjara

POLITIK DAN HUKUM

Terdakwa Rendra Kresna terbukti menerima uang suap senilai Rp7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas...



Kamis, 09 Mei 2019, 16:05 WIB

BMKG Sebut Wilayah Sumsel Masuk Musim Kemarau

NUSANTARA

Arah angin permukaan yang terjadi umumnya dari tenggara. Minimnya pasokan uap air dan kecepatan angin lapisan...



Kamis, 09 Mei 2019, 16:00 WIB

Jokowi-Amin Dipastikan Menang Telak di Jatim

POLITIK DAN HUKUM

Dari rekapitulasi penghitungan suara di 23 kabupaten/kota, Jokowi-Ma'ruf menang cukup mutlak dengan...



Kamis, 09 Mei 2019, 15:57 WIB

Bahaya, Ancaman Kepunahan Spesies Meningkat Drastis!

WEEKEND

Laporan badan PBB, IPBES menyebutkan bahwa sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan kini terancam...



Kamis, 09 Mei 2019, 15:55 WIB

BPIP Dorong Presiden Bentuk Zaken Kabinet

POLITIK DAN HUKUM

Zaken kabinet merupakan kabinet yang berisikan orang-orang...



Kamis, 09 Mei 2019, 15:50 WIB

TKN : Hentikan Provokasi, Perbanyak Introspeksi Diri

POLITIK DAN HUKUM

TKN mempertanyakan sikap segelintir elite politik yang kerap mendeligitasi pemilu...



Kamis, 09 Mei 2019, 15:45 WIB

Pelatih Yakin Greysia/Apriyani Tampil Prima di Piala Sudirman

OLAHRAGA

Greysia/Apriyani merupakan pasangan yang konsisten dan stabil sehingga dipilih menjadi satu-satunya ganda...



Kamis, 09 Mei 2019, 15:45 WIB

Ratna Sarumpaet Berbohong karena Kontraksi Dua Obat

POLITIK DAN HUKUM

Dua obat yang dimaksud ialah obat antidepresan yang rutin dikonsumsi terdakwa dan obat bius saat tindakan...



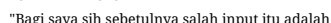
Kamis, 09 Mei 2019, 15:42 WIB

Mahasiswa Terpilih Jadi Anggota Legislatif Termuda Dari Bondowoso

POLITIK DAN HUKUM

Di Dapil 1 Bondowoso ini, PDI Perjuangan berhasil





HOME

NEWS ▾

RAMADAN

FOTO

VIDEO

WEEKEND

EKONOMI

INTERNASIONAL

MEGAPOLITAN

NUSANTARA

OLAHRAGA

POLITIK DAN HUKUM

SEPAK BOLA

RI Harus Manfaatkan Momentum di DK PBB

Dokter asal Beijing ungkap cara memulihkan AD

TKN Nilai Ijtimak Ulama Alpa Sampaikan Bukti

Luhut Sebut Sejak Awal Prabowo Bersedia untuk

Ijtimak Minta 01 Didiskualifikasi KPU :

Kesaksian Rocky, Ratna telah Buat Onar

Tempat Rukyat dan Hilal Awal Ramadan 1440 H

Ahli ortopedi Beijing: "Nyeri lutut hilang dalam AD